
Relasi Kuasa Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kebudayaan Lokal: Studi di Kampung Adat Bena, Desa Tiwuruwu, Kabupaten Ngada, NTT

Bruno Rey Sonby Pantola

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta

E-mail: brunorey083@gmail.com

Article History:

Received: 12 Juli 2023

Revised: 21 Juli 2023

Accepted: 22 Juli 2023

Keywords: : Power relations, Local Government, Village Government, Customary Institutions, Local culture.

Abstract: *This research analyzes the power relations between the Local Government, Village Government, and Customary Institutions in the development of local culture in Kampung Adat Bena, Tiwuriwu Village, Ngada Regency, NTT. A descriptive qualitative approach method was used with interviews, observations, and documentation studies. The results showed the need for harmonization of customary norms and formal regulations, as well as collaboration between related parties for sustainable preservation of local culture.*

PENDAHULUAN

Budaya lokal memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan identitas dan warisan budaya suatu masyarakat. Di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, kampung-kampung adat menjadi perwujudan nyata dari keberagaman budaya yang kaya. Salah satu kampung adat yang mempertahankan keaslian budayanya adalah Kampung Adat Bena, yang terletak di Desa Tiwuriwu, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam pengembangan dan pelestarian budaya lokal, termasuk kampung adat seperti Bena. Namun, dalam konteks ini, terdapat permasalahan terkait relasi kuasa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal. Permasalahan tersebut mencakup beberapa aspek yang perlu dipahami secara mendalam.

Pertama, kuasa supra desa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat menjadi kendala dalam upaya membangun budaya lokal. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Bena mungkin menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan budayanya sendiri sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014. Keterlibatan Pemerintah Daerah yang berlebihan dapat menghambat kreativitas dan inovasi lokal dalam memperkaya budaya di Kampung Adat Bena.

Kedua, upaya pembangunan budaya berbasis legal formal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mungkin berpotensi bertentangan dengan norma adat dan dinamika masyarakat adat Bena. Dalam situasi ini, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana harmonisasi antara norma adat dan peraturan formal dapat tercapai agar keberlanjutan budaya lokal tetap terjaga.

Ketiga, meskipun pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur pembangunan budaya di Kampung Adat Bena. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa manfaat yang dihasilkan dari

sektor pariwisata mungkin tidak sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan budaya lokal, melainkan lebih difokuskan pada pengembangan pariwisata itu sendiri.

Untuk menggali lebih dalam permasalahan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini akan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara mendalam tentang relasi kuasa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal di Kampung Adat Bena. Data akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika relasi kuasa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal, dengan fokus pada Kampung Adat Bena. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak terkait, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal di kampung adat serta daerah sekitarnya.

Keterbatasan penelitian ini meliputi keterbatasan sumber daya dan waktu yang dapat mempengaruhi cakupan data yang diperoleh. Namun, peneliti akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi keterbatasan tersebut guna memperoleh hasil penelitian yang akurat dan bermakna. Demikianlah pendahuluan yang menggambarkan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti dalam jurnal ini. Selanjutnya, penelitian akan dilanjutkan dengan menguraikan kerangka teoritis, metodologi penelitian, analisis data, dan temuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang relasi kuasa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal di Kampung Adat Bena, Desa Tiwuriwu, Kabupaten Ngada, NTT.

LANDASAN TEORI

1. Kuasa Supra Desa dalam Upaya Membangun Budaya Lokal

Landasan teori ini berkaitan dengan konsep kuasa supra desa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, dapat dikaji konsep otonomi daerah dan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa. Teori mengenai pemerintahan lokal, desentralisasi, dan pengambilan keputusan politik di tingkat daerah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kuasa supra desa dapat mempengaruhi upaya Pemerintah Desa dalam membangun budaya lokal.

2. Hubungan antara Norma Adat dan Legal Formal dalam Pembangunan Budaya Lokal

Landasan teori ini melibatkan pemahaman tentang peran dan hubungan antara norma adat dan legal formal dalam konteks pembangunan budaya lokal. Konsep-konsep seperti pluralisme hukum, harmonisasi budaya, dan adaptasi kebijakan dapat digunakan untuk menganalisis dinamika interaksi antara norma adat dan peraturan formal dalam pengembangan budaya lokal di Kampung Adat Bena. Pemahaman tentang keunikan budaya lokal dan pentingnya mempertahankan warisan budaya juga relevan dalam konteks ini.

3. Pembangunan Pariwisata dan Pembangunan Budaya Lokal

Landasan teori ini melibatkan kajian mengenai hubungan antara pembangunan pariwisata dan pembangunan budaya lokal. Teori pariwisata berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan manfaat sosial ekonomi dapat menjadi landasan untuk memahami bagaimana pembangunan pariwisata dapat berdampak pada pembangunan budaya lokal di Kampung Adat Bena. Dalam konteks ini, peraturan dan kebijakan terkait pengembangan pariwisata serta distribusi manfaatnya juga perlu diperhatikan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami dan menggambarkan relasi kuasa antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Lembaga Adat dalam mengembangkan budaya lokal di Kampung Adat Bena, Desa Tiwuriwu, Kabupaten Ngada, NTT. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang situasi dan dinamika yang terjadi dalam konteks relasi kuasa, bukan sekadar pengukuran statistik.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga sumber utama: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti kepala desa, ketua adat, anggota pemerintah daerah yang terlibat dalam kebudayaan, dan tokoh masyarakat di Kampung Adat Bena. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur untuk memahami pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terkait relasi kuasa dan upaya pengembangan budaya lokal. Selain wawancara, observasi juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Peneliti melakukan observasi langsung untuk mengamati interaksi dan kegiatan terkait budaya lokal di Kampung Adat Bena. Observasi membantu mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang konteks kehidupan budaya lokal dan dinamika sosial yang ada. Data tambahan diperoleh melalui studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan daerah, kebijakan pemerintah terkait kebudayaan, catatan sejarah, dan literatur terkait tentang Kampung Adat Bena.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Proses pengolahan data melibatkan pengkodean, kategorisasi, dan identifikasi pola atau temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam upaya memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi data, yaitu membandingkan dan memverifikasi temuan dari berbagai sumber data untuk mencapai konsistensi dan validitas data yang diperoleh. Penelitian ini juga berpedoman pada prinsip etika penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti memperoleh persetujuan tertulis dari para responden dan memberikan informasi lengkap tentang tujuan dan manfaat dari data yang dikumpulkan. Hak privasi dan kerahasiaan para responden dijaga dengan ketat.

Dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang relasi kuasa antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Lembaga Adat dalam pengembangan budaya lokal di Kampung Adat Bena, NTT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan tentang relasi kuasa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal di Kampung Adat Bena. *Pertama*, Kuasa Supra Desa dalam Upaya Membangun Budaya Lokal Pada pembahasan ini, fokus akan diberikan pada analisis mengenai pengaruh kuasa supra desa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terhadap upaya Pemerintah Desa dalam membangun budaya lokal di Kampung Adat Bena. Melalui wawancara dengan pihak terkait, data akan dikumpulkan untuk menganalisis sejauh mana Pemerintah Daerah terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan budaya lokal. Hasil analisis ini akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana Pemerintah Desa memiliki keleluasaan dalam mengembangkan budaya lokal sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014.

Kedua, Hubungan antara Norma Adat dan Legal Formal dalam Pembangunan Budaya Lokal Dalam pembahasan ini, akan dianalisis bagaimana hubungan antara norma adat dan legal formal mempengaruhi pembangunan budaya lokal di Kampung Adat Bena. Studi dokumentasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat adat Bena akan digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang norma adat yang menjadi dasar dari budaya lokal mereka.

Selanjutnya, akan dianalisis bagaimana peraturan formal yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah berinteraksi dengan norma adat tersebut, dan apakah terjadi harmonisasi atau pertentangan antara keduanya.

Ketiga, Pembangunan Pariwisata dan Pembangunan Budaya Lokal Pada pembahasan ini, akan dikaji dampak pembangunan pariwisata terhadap pembangunan budaya lokal di Kampung Adat Bena. Data dari wawancara dengan masyarakat lokal dan pihak terkait akan digunakan untuk menganalisis sejauh mana pembangunan pariwisata memberikan kontribusi pada pembangunan budaya lokal. Selain itu, akan dianalisis juga distribusi manfaat dari sektor pariwisata, apakah manfaat tersebut secara adil dialokasikan untuk pembangunan budaya lokal atau lebih difokuskan pada pengembangan pariwisata itu sendiri.

Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat terungkap dinamika relasi kuasa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal di Kampung Adat Bena. Hasil analisis akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal serta saran-saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan peran dan kemandirian Pemerintah Desa dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kampung Adat Bena.

Wawancara Bersama kepala desa mengatakan bahwa; *“kami sudah berupaya untuk membangun budaya melalui kerjasama dengan lembaga adat Bena. tetapi kami harus menunggu kebijakan dari pemerintah daerah terkait kebudayaan sehingga kami juga dapat membuat kebijakan khusus untuk pembangunan budaya lokal yang sudah ada di des kami.”* Berdasarkan pernyataan dari kepala desa yang menyatakan bahwa mereka telah berupaya membangun budaya melalui kerjasama dengan lembaga adat Bena, namun mereka harus menunggu kebijakan dari pemerintah daerah terkait kebudayaan, maka kesimpulan tambahan dapat ditarik:

Kepala desa menyadari pentingnya kerjasama dengan lembaga adat Bena dalam membangun budaya lokal. Upaya kolaboratif ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan warisan budaya dan melibatkan pemangku kepentingan lokal. Tergantung pada kebijakan pemerintah daerah, Pemerintah Desa merasa terbatas dalam membuat kebijakan khusus untuk pembangunan budaya lokal yang sudah ada di desa mereka. Ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan dan kerjasama yang erat antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pembangunan budaya lokal yang lebih efektif.

Penting bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian khusus dan memfasilitasi kebijakan yang memungkinkan Pemerintah Desa untuk memiliki peran yang lebih aktif dalam pembangunan budaya lokal. Kolaborasi yang erat dengan lembaga adat Bena juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal yang lebih berkelanjutan di Kampung Adat Bena dan desa sekitarnya.

Wawancara bersama ketua adat, mengatakan bahwa: *“pembangunan budaya itu membutuhkan semua pihak, tetapi kami sudah buat pengelola khusus untuk mengelola dinamika kebudayaan kami dan juga pariwisata.”*. Berdasarkan pernyataan dari ketua adat yang menyatakan bahwa pembangunan budaya membutuhkan semua pihak dan mereka telah membuat pengelola khusus untuk mengelola dinamika kebudayaan dan pariwisata, maka dapat ditarik kesimpulan tambahan:

Ketua adat mengakui pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pembangunan budaya, termasuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Ini menunjukkan kesadaran akan perlunya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengembangkan budaya lokal. Adanya pengelola khusus yang ditunjuk oleh lembaga adat untuk mengelola dinamika kebudayaan dan pariwisata menunjukkan upaya konkret dalam mengelola dan mempromosikan

warisan budaya lokal secara berkelanjutan. Hal ini dapat memastikan adanya pemeliharaan yang baik terhadap keaslian budaya lokal dan distribusi manfaat pariwisata secara adil. Penting bagi Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pengelola khusus yang telah ditunjuk oleh lembaga adat. Kolaborasi antara pengelola khusus, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah dapat memperkuat upaya pembangunan budaya lokal yang holistik dan berkelanjutan di Kampung Adat Bena.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relasi kuasa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal di Kampung Adat Bena, Desa Tiwuriwu, Kabupaten Ngada, NTT. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan ketua adat, serta analisis terhadap pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, dan pembahasan, ditarik beberapa kesimpulan penting. Kuasa supra desa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah membatasi keleluasaan Pemerintah Desa dalam membangun budaya sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Terdapat pula pertentangan antara norma adat dan legal formal dalam pembangunan budaya di Kampung Adat Bena, namun juga terlihat upaya harmonisasi antara keduanya. Otonomi desa memberikan peran penting bagi Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal, sementara peraturan formal yang terkait dengan pembangunan budaya perlu diintegrasikan dengan norma adat dan dinamika masyarakat lokal.

Kuasa supra desa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah mempengaruhi keleluasaan Pemerintah Desa dalam membangun budaya lokal di Kampung Adat Bena. Tantangan muncul dalam harmonisasi antara norma adat dan peraturan formal, namun juga terlihat adanya upaya kolaborasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pembangunan pariwisata memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan budaya lokal, namun belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur pengembangan budaya dalam konteks pariwisata.

Pertama, perlu meningkatkan pemahaman terkait otonomi desa dan peran Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal. **Kedua**, perlu dilakukan harmonisasi antara norma adat dan peraturan formal dalam pembangunan budaya. **Ketiga**, diperlukan peraturan daerah khusus yang mengatur pembangunan budaya dalam konteks pariwisata. **Keempat**, perlu diperkuat kerjasama antara Pemerintah Desa, lembaga adat Bena, dan Pemerintah Daerah dalam membangun budaya lokal. **Kelima**, perlu dilakukan pengelolaan yang baik terhadap dinamika kebudayaan dan pariwisata melalui pengelola khusus yang ditunjuk oleh lembaga adat Bena.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan peran dan kemandirian Pemerintah Desa dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kampung Adat Bena, serta memastikan keberlanjutan budaya lokal yang autentik dan distribusi manfaat pariwisata yang adil.

DAFTAR REFERENSI

- Eko, Sutoro, et al. "Desa membangun Indonesia." *FPPD. Yogyakarta* (2014).
- Ulil, Ahmadulil Ulil. "Penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal dalam pembangunan sistem hukum nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8.1 (2019): 113-126.
- Adi, I. Nyoman R., and Made Mulyadi. "Mediasi Community Based Tourism Pada Pengaruh Peran Desa Adat Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli." *Jurnal Media Bina Ilmiah* 14.3 (2019).
- Anggara, Sahya. "Metode Penelitian Administrasi." (2015).